

Analisis Lokasi Kawasan Kumuh dan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Jambi

Welly Yulfan Endin*, Rosyani, Harmes

Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Jambi

*Correspondence: wellyendin@gmail.com

Abstrak. Persoalan perkotaan yang ada Kota Jambi adalah luasnya permukiman kumuh. Berdasarkan SK Walikota Jambi Nomor: 166 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Jambi, diketahui bahwa terdapat seluas 689,10 hektar permukiman kumuh yang tersebar di 13 kelurahan dan 5 kecamatan. Berdasarkan SK Walikota Jambi tersebut, salah satu kecamatan yang terdapat permukiman kumuh adalah Kecamatan Kota Baru yang berkedudukan ibukota wilayah administratif Kota Jambi. Tujuan dari penelitian ini yaitu 1). Mengetahui kondisi fisik kawasan permukiman kumuh di kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Jambi. 2.) Menganalisis Hubungan Lingkungan Fisik dengan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Jambi. Jenis penelitian campuran antara kualitatif dan kuantitatif yang fokus terhadap kondisi faktual di lapangan untuk menentukan skenario penanganan fisik dan partisipasi masyarakat di Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Jambi. Jenis penelitian kuantitatif digunakan untuk menentukan sasaran pertama dan kedua, sedangkan untuk menentukan sasaran ketiga penelitian dikembangkan model skenario hasil penelitian pertama dan kedua. Penelitian dilakukan 18 RT di Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Data dianalisis menggunakan metode slovin. Hasil penelitian menunjukkan 1). Rata-rata hasil penilaian kondisi fisik bangunan Gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan kondisi proteksi kebakaran mencapai 14. Sesuai kriteria penilaian Kawasan kumuh, maka Kelurahan Suka Karya termasuk dalam kategori Tidak Kumuh. 2). Partisipasi masyarakat di lokasi ini sudah masuk dalam kategori adanya pelimpahan kewenangan kepada masyarakat dalam penanganan Kawasan kumuh.

Kata kunci : perumahan kumuh, permukiman kumuh, kawasan kumuh.

Abstract. The urban problem in Jambi City is the extent of slum settlements. Based on the Decree of the Mayor of Jambi Number: 166 of 2016 concerning Determining the Location of Slum Housing and Slum Housing in Jambi City, it is known that there are 689.10 hectares of slums spread across 13 sub-districts and 5 sub-districts. Based on the Jambi Mayor's Decree, one of the sub-districts with slum settlements is Kota Baru District, which is located as the capital of the administrative area of Jambi City. The aims of this research are 1). Knowing the physical condition of the slum area in the Suka Karya sub-district, Kota Baru District, Jambi. 2.) Analyzing the Relationship between the Physical Environment and Community Participation in Suka Karya Village, Kota Baru District, Jambi. This type of mixed qualitative and quantitative research focuses on factual conditions in the field to determine scenarios for physical management and community participation in Suka Karya Village, Kota Baru District, Jambi. This type of quantitative research was used to determine the first and second objectives, while to determine the third research target a scenario model was developed from the results of the first and second studies. The study was conducted in 18 RTs in the Suka Karya Village, Kota Baru District, Jambi City. Data were analyzed using the slovin method. The research results show 1). The average results of the assessment of the physical condition of buildings, environmental roads, drinking water supply, environmental drainage, waste water management, waste management and fire protection conditions reached 14. According to the criteria for evaluating slum areas, Suka Karya Village is included in the Not Slum category. 2). Community participation in this location is included in the category of delegation of authority to the community in handling slum areas.

Keywords: slum housing, slums, slum area.

PENDAHULUAN

Kota dan permukiman kumuh merupakan isu pembangunan dunia yang masih relevan dikaji saat ini. Salah satu target pembangunan berkelanjutan global (sustainable development goals - SDGs) pada tahun 2030 adalah menjamin akses bagi semua terhadap

perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh. Isu ini merupakan rencana global yang fokus pada pembangunan perkotaan tanpa Kawasan kumuh (Keman, 2005). Kota Jambi merupakan kawasan perkotaan terbesar sekaligus menjadi ibukota Provinsi Jambi yang terletak antara

ketinggian 10 – 60 meter atas permukaan laut. Jumlah penduduk Kota Jambi 612.162 Jiwa Tahun 2021 (BPS, 2022). Letak geografis Kota Jambi sebelah barat, timur, utara dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi, jadi Kota Jambi dikelilingi oleh Kabupaten Muaro Jambi. Luas wilayah Kota Jambi 205,38 km², memiliki kepadatan penduduk 2.878 Jiwa/km².

Sebagaimana kondisi perkotaan secara umum, salah satu persoalan perkotaan yang ada Kota Jambi adalah luasnya permukiman kumuh. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 166 Tahun 2016 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Jambi, diketahui bahwa terdapat seluas 689,10 hektar permukiman kumuh yang tersebar di 13 kelurahan dan 5 kecamatan. Berdasarkan SK Walikota Jambi tersebut, salah satu kecamatan yang terdapat permukiman kumuh adalah Kecamatan Kota Baru yang berkedudukan ibukota wilayah administratif Kota Jambi. Secara fungsional Kawasan Kota Baru adalah pusat perkantoran pemerintahan kota Jambi dan sebagian perkantoran pemerintah propinsi Jambi. Selain itu pemanfaatan ruang di Kawasan ini juga didominasi oleh penggunaan aktivitas komersial, perumahan dan permukiman. Kedudukan dan fungsi yang diemban Kecamatan Kota Baru menempatkannya sebagai etalase pencerminan Kota serta Propinsi Jambi secara keseluruhan.

Secara lokasional antara kawasan pusat perkantoran pemerintah propinsi Jambi di wilayah Telanaipura dan kawasan komersial simpang III Sipin menuju Kawasan Pusat Perkantoran Kota Baru terdapat salah satu kelurahan yang secara posisional sangat strategis merepresentasikan Propinsi dan Kota Jambi. Kelurahan tersebut adalah Kelurahan Sukakarya, yang berdasarkan keputusan Walikota Jambi No. 166/2016 termasuk sebagai lokasi permukiman kumuh.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kecamatan Kota baru kawasannya relatif baru berkembang dan dibangun dengan banyak program pembangunan dari pemerintah daerah, namun pada beberapa wilayah kelurahan sudah mengalami penurunan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman. Hal ini pada akhirnya berakibat pada muncul dan berkembangnya Kawasan permukiman kumuh. Apabila permasalahan permukiman kumuh ini dibiarkan tanpa ada penanganan dari para stake holder bidang perumahan dan permukiman, maka kualitas permukiman masyarakat di kota akan terus menurun dan akan menimbulkan

permasalahan sosial dan ekonomi perkotaan dengan skala yang lebih besar.

Realitas letak strategis Kelurahan Sukakarya bagi Propinsi dan Kota Jambi, membuat peneliti tertarik untuk mengetahui secara mendalam fenomena kekumuhan fisik wilayah dan partisipasi masyarakat dalam penanganan Kawasan kumuh yang terjadi di Kota Jambi khususnya di Kecamatan Kota Baru pada Kelurahan Sukakarya. Selain itu adanya kebijakan nasional sampai ke daerah-daerah dalam penanganan perumahan dan permukiman kumuh (Budihardjo, 1998) melalui regulasi yang diimplementasikan menjadi program dan kegiatan seperti program KOTAKU (kota tanpa kumuh) dan program perkotaan lainnya yang telah diimplementasikan sejak lama dapat dijadikan sebagai bagian pembelajaran penanganan kawasan kumuh (Sahria, 2018). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola penanganan dan keikutsertaan masyarakat dalam menanggulangi masalah permukiman kumuh, di Kota Jambi khususnya di Kecamatan Kota Baru Kelurahan Sukakarya.

METODE

Penelitian dilaksanakan selama 2 (dua) bulan, yaitu mulai bulan Oktober – November 2022, yang meliputi pengumpulan data primer dan sekunder, pengolahan dan analisis data. Lokasi penelitian adalah rukun tetangga yang ditetapkan sebagai permukiman kumuh di Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. Kelurahan Suka Karya ini mengalami penurunan kualitas lingkungan permukiman, berdasarkan SK Walikota Jambi Nomor: 166 Tahun 2016 tertanggal 17 Maret 2016 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kota Jambi. Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk yang ada di 18 RT yang termasuk dalam kategori permukiman kumuh Kelurahan Suka Karya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *probability sampling*. Metode slovin akan dijadikan sebagai teknik menentukan jumlah sampel yang akan diambil. Rumus Slovin yaitu dengan ketentuan apabila populasi lebih dari 100 maka presisi diambil 15% - 20%; jika populasi berjumlah 51 – 100 maka presisi diambil 10% dan jika populasinya kurang dari 50 maka sampel diambil semua, sama dengan populasi. Sugiyono (2015).

Rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N.e^2+1}$$

dimana: n = ukuran sampel; N = ukuran Populasi;
e = taraf Kesalahan (error)

Tabel 1
Populasi dan Sampel Rumah Tangga di Permukiman Kumuh Kelurahan Suka Karya

No	RT	Kepala Rumah Tangga	Sampel
1	RT 01	60	3
2	RT 02	122	6
3	RT 03	161	8
4	RT 04	79	4
5	RT 05	181	9
6	RT 06	176	9
7	RT 07	144	7
8	RT 08	147	7
9	RT 09	130	6
10	RT 10	91	4
11	RT 11	102	5
12	RT 12	50	2
13	RT 13	124	6
14	RT 14	134	7
15	RT 15	51	3
16	RT 16	62	3
17	RT 17	42	2
18	RT 18	68	3
TOTAL		1928	

Sumber: Profil LKM suka karya Tahun 2021

HASIL

Tabel 2
Aspek Kondisi Bangunan Gedung

Lokasi	Keteraturan Bangunan (%)	Skoring	Kondisi Kepadatan Bangunan Hunian	Skoring	Kondisi ALADIN Sesuai persyaratan teknis (%)	Skoring
RT001	85,71	1	Rendah	1	85,71	1
RT002	76	1	Rendah	1	87	1
RT003	100	1	Rendah	1	100	1
RT004	100	1	Rendah	1	100	1
RT005	80	1	Rendah	1	86,67	1
RT006	100	1	Rendah	1	91,6	1
RT007	85,82	1	Rendah	1	100	1
RT008	88	1	Rendah	1	97	1
RT009	49,53	5	Rendah	1	100	1
RT010	100	1	Rendah	1	100	1
RT011	100	1	Rendah	1	89	1
RT012	100	1	Rendah	1	100	1
RT013	92	1	Rendah	1	100	1
RT014	100	1	Rendah	1	100	1
RT015	71	3	Rendah	1	100	1
RT016	100	1	Rendah	1	100	1
RT017	100	1	Rendah	1	100	1
RT018	48,5	5	Rendah	1	97	1

Sumber: data olahan

Aspek kondisi bangunan masuk salah satu indikator permukiman kumuh berdasarkan Permen PUPR RI Nomor 2 Tahun 2016. Kondisi bangunan gedung di lokasi Kelurahan Suka karya menurut kriteria ketidakteraturan bangunan memiliki nilai kumuh ringan, sedangkan pada kepadatan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan dengan nilai tidak kumuh. Kriteria ketidakteraturan bangunan kumuh sedang diakibatkan karena dalam perencanaan bangunan hunian belum disusun dengan peraturan yang jelas. Masyarakat dalam membangun rumah hanya mengikuti luasan lahan

yang tersedia. Sehingga bangunan hunian terlebih dahulu dibangun baru akses jalan lingkungan kemudian (Khairudin, 1992)

Aspek kekumuhan yang di nilai adalah kondisi jalan lingkungan yang ada di lingkungan permukiman. Kriteria cakupan pelayanan jalan lingkungan yaitu total panjang jalan eksisting dibagi dengan total panjang jalan ideal dikali dengan persentase, maka akan keluar persentase dalam kriteria cakupan pelayanan jalan lingkungan. Kriteria kualitas permukaan jalan lingkungan yaitu total panjang jalan permukaan yang rusak dibagi dengan total panjang jalan

lingkungan yang di lingkungan permukiman dikali dengan persentase, maka akan keluar persentase jalan lingkungan permukiman yang permukaan jalan yang rusak atau kualitas permukaan jalan yang tidak baik.

Tabel 3
Aspek Kondisi Jalan Lingkungan

Lokasi	Jangkauan Jaringan Jalan (%)	Skoring	Kondisi Lingkungan	Persyaratan Teknis/Kualitas Jalan (%)	Skoring
RT 1	100	1	Rendah	89,99	1
RT 2	39	5	Rendah	23	5
RT 3	75	3	Rendah	75	3
RT 4	25,3	5	Rendah	27,5	5
RT 5	86,42	1	Rendah	75	3
RT 6	40	5	Rendah	40	5
RT 7	45,45	5	Rendah	40,91	5
RT 8	65	3	Rendah	66	3
RT 9	71,43	3	Rendah	64,29	3
RT 10	100	1	Rendah	100	1
RT 11	71	3	Rendah	71	3
RT 12	100	1	Rendah	100	1
RT 13	44	5	Rendah	50	3
RT 14	67	3	Rendah	58,35	3
RT 15	20	5	Rendah	15	5
RT 16	82	1	Rendah	100	1
RT 17	100	1	Rendah	100	1
RT 18	66	3	Rendah	51	3

Sumber: data olahan

Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa 0% atau nilai tidak kumuh pada kriteria cakupan pelayanan jalan lingkungan di Kelurahan Sukakarya. Pada kriteria kualitas permukaan jalan lingkungan di Kelurahan Sukakarya ada 43,16% atau nilai kumuh ringan, Kualitas permukaan jalan lingkungan Kelurahan Sukakarya memiliki jalan yang rusak lebih besar. Aspek kekumuhan yang ketiga dalam menilai lingkungan permukiman kumuh adalah kondisi penyediaan air minum. Ketersediaan akses aman air minum dan tidak terpenuhinya kebutuhan air minum merupakan kriteria atau parameter yang ada di aspek penyediaan air minum. Kriteria

ketersediaan akses aman air minum yaitu jumlah kepala keluarga yang belum memiliki akses aman air minum dibagi total kepala keluarga di satu satuan wilayah dikali seratus persen maka didapat persentase jumlah kepala keluarga yang belum memiliki akses aman air minum. Kriteria tidak terpenuhinya kebutuhan air minum adalah jumlah kepala keluarga yang tidak terpenuhinya kebutuhan air minum dibagi total kepala keluarga yang ada di satu satuan wilayah dikali seratus persen maka didapat persentase jumlah kepala keluarga yang belum terpenuhinya kebutuhan air minum.

Tabel 4
Aspek Kondisi Penyediaan Air Minum

Lokasi	Ketersediaan Akses AM (%)	Skoring	Kondisi Air Minum	Keterpenuhan Kebutuhan AM/Baku (%)	Skoring
RT 1	85,71	1	Rendah	85,71	1
RT 2	82	1	Rendah	99	1
RT 3	100	1	Rendah	100	1
RT 4	100	1	Rendah	100	1
RT 5	95,15	1	Rendah	32,73	5
RT 6	100	1	Rendah	100	1
RT 7	100	1	Rendah	100	1
RT 8	95	1	Rendah	94	1
RT 9	95,33	1	Rendah	21,5	5
RT 10	100	1	Rendah	100	1
RT 11	89	1	Rendah	89	1
RT 12	100	1	Rendah	100	1
RT 13	100	1	Rendah	100	1
RT 14	100	1	Rendah	100	1
RT 15	100	1	Rendah	100	1
RT 16	100	1	Rendah	100	1
RT 17	100	1	Rendah	100	1
RT 18	91	1	Rendah	100	1

Sumber: data olahan

Pada Tabel.4 bahwa pada Kelurahan Sukakarya aspek kondisi penyediaan air minum memiliki nilai tidak kumuh di dua kriteria yaitu kriteria ketersediaan akses aman air minum dan kriterian tidak terpenuhinya kebutuhan air minum. Aspek kondisi drainase lingkungan memiliki 5 kriteria yaitu: (1) kriteria ketidakmampuan mengalirkan limpasan air hujan/run-off air permukaan; (2) kriteria ketersediaan drainase lingkungan; (3) ketidakberhubungan dengan sistem drainase kota; (4) kriteria tidak terpelihara drainase; dan (5) kriteria kualitas konstruksi drainase.

Kriteria ketidakmampuan mengalirkan drainase yaitu luasan daerah yang terjadi genangan dibagi dengan total luasan satu satuan wilayah dikali dengan seratus persen, maka didapat persentase luas wilayah yang terjadi genangan. Kriteria ketidaktersediaan drainase yaitu dengan jumlah panjang drainase yang belum dibangun dengan total panjang jalan drainase lingkungan yang ada di satu satuan wilayah dikali dengan seratus persen, maka

didapat persentase ketidaktersediaan drainase lingkungan pada satu wilayah. Kriteria ketidakterhubungan dengan sistem kota ialah jumlah panjang drainase lingkungan yang tidak memiliki hubungan dengan sistem drainase kota dibagi dengan total panjang drainase yang ada di satu satuan wilayah dikali dengan seratus persen, maka didapat persentase ketidakterhubungan dengan system drainase kota pada satu satuan wilayah. Kriteria tidak terpelihara drainase lingkungan yaitu panjang drainase lingkungan yang tidak terpelihara dibagi dengan total panjang drainase lingkungan pada satu satuan wilayah dikali dengan seratus persen maka didapat persentase panjang drainase lingkungan yang tidak terpelihara. Kriteria konstruksi drainase ialah panjang drainase dengan konstruksi rusak dibagi dengan total panjang drainase pada lingkungan permukiman satu satuan wilayah dikali dengan seratus persen maka didapat persentase kualitas konstruksi drainase lingkungan permukiman.

Tabel 5
Rekapitulasi Aspek Kondisi Drainase

Lokasi	Kejadian Tidak Ada Genangan (%)	Skoring	Kondisi Drainase	Persyaratan Teknis/Kualitas Drainase (%)	Skoring
RT 1	44,07	3	Sedang	25,75	5
RT 2	24	5	Tinggi	55	3
RT 3	100	1	Rendah	50	3
RT 4	100	1	Rendah	100	1
RT 5	71,75	3	Sedang	57,14	3
RT 6	100	1	Rendah	80,3	1
RT 7	11,57	5	Tinggi	65,38	3
RT 8	100	1	Rendah	91	1
RT 9	88,03	1	Rendah	75	1
RT 10	5,07	5	Tinggi	50	3
RT 11	100	1	Rendah	71	1
RT 12	100	1	Rendah	50	3
RT 13	64	3	Sedang	57	3
RT 14	100	1	Rendah	43	3
RT 15	100	1	Rendah	100	1
RT 16	100	1	Rendah	50	3
RT 17	100	1	Rendah	100	1
RT 18	100	1	Rendah	70	3

Sumber: data olahan

Pada Tabel 5 tergambar bahwa kriteria tidak terpeliharanya drainase memiliki nilai kumuh berat (96.65%). Kriteria ketidakmampuan mengalirkan limpasan air memiliki nilai 32,96% (kumuh ringan). Pada kriteria ketidaktersediaan drainase Kelurahan Sukakarya memiliki persentase 35,22% (Kumuh ringan). Kriteria

ketidakterhubungan dengan sistem drainase kota nol persen berarti semua drainase lingkungan permukiman sudah terhubung dengan sistem drainase kota.

Aspek kekumuhan yang keenam adalah aspek kondisi pengelolaan persampahan. Aspek ini memiliki 3 (tiga) kriteria yaitu 1) Prasarana

dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis; 2) Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis; dan 3) Tidak terpelihara sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. Kriteria prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis ialah jumlah kepala keluarga yang prasana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis dibagi dengan total kepala keluarga yang ada di satu satuan wilayah dikali seratus persen maka didapat persentase jumlah kepala keluarga yang prasarana dan sarana persampahan yang tidak sesuai standar teknis.

Kriteria sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai dengan standar teknis yaitu jumlah kepala keluarga yang sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai standar teknis dibagi dengan total kepala keluarga yang ada pada satu

satuan wilayah dikali dengan seratus persen maka didapat persentase kepala keluarga yang sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai dengan standar teknis. Kriteria tidak terpelihara sarana dan prasarana pengelolaan persampahan ialah jumlah kepala keluarga tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dibagi total kepala keluarga di satu satuan wilayah maka didapat persentase jumlah kepala keluarga tidak terpelihara sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. Pada Tabel 6 menunjukkan bahwa aspek kekumuhan pengelolaan persampahan memiliki nilai yang paling besar permasalahan yang hampir 100%. Kelurahan Sukakarya pada kriteria prasarana dan sarana persampahan yang sesuai dengan standar teknis dan kriteria tidak terpelihara dengan baik prasarana dan sarana persampahan.

Tabel 6
Rekapitulasi Aspek Pengelolaan Persampahan

Lokasi	Pengelolaan Persampahan (%)	Skoring	Kondisi Sampah
RT 1	85,71	1	Rendah
RT 2	93	1	Rendah
RT 3	51	3	Sedang
RT 4	20	5	Tinggi
RT 5	85,45	1	Rendah
RT 6	50	3	Sedang
RT 7	98,58	1	Rendah
RT 8	41	3	Sedang
RT 9	0	5	Tinggi
RT 10	50	3	Sedang
RT 11	70	3	Sedang
RT 12	100	1	Rendah
RT 13	100	1	Rendah
RT 14	100	1	Rendah
RT 15	100	1	Rendah
RT 16	100	1	Rendah
RT 17	100	1	Rendah
RT 18	88	1	Rendah

Sumber: data olahan

Partisipasi masyarakat mengindikasikan keikutsertaan penduduk dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di kelurahan Suka Karya baik secara berkelompok dengan bergotong royong maupun secara individual dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukimannya (Sri Handayani, 2008). Beragam kegiatan partisipasi antar lain berupa membangun tempat tinggal sesuai dengan aturan pemerintah tentang bangunan gedung,

memperbaiki jalan lingkungan, drainase lingkungan, membersihkan sampah, memberi sumbangan dana lingkungan, menyediakan sarana proteksi kebakaran serta sumbangan tenaga serta pemikiran pada kegiatan-kegiatan dalam memperbaiki kualitas lingkungan permukiman ataupun mencegah terjadinya kekumuhan Kawasan permukiman (Sekar Ayu Advianty, 2013)

Tabel 7
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Sukakarya

No	Tingkat Partisipasi	Indikator Pelibatan Masyarakat	Nilai	Frekwensi (%)
1	Manipulasi	Tidak ada informasi program/kegiatan ke masyarakat	-	-
2	Therapy	- Informasi program sampai ke masyarakat - Tidak adanya jaring aspirasi masyarakat	2 x 5 = 6	5,26%
3	Pemberian Informasi	- Program sampai ke masyarakat - Terdapat sosialisasi program (1arah) - Tidak ada jaring aspirasi Masyarakat	3 x 5 = 10	5,26%
4	Konsultasi	- Terdapat jaring aspirasi masyarakat - Tidak ada pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan Akhir	4 x 6 = 24	6,32%
5	Perujukan	- Adanya pelibatan beberapa masyarakat dalam pengambilan keputusan akhir - Kedudukan masyarakat dalam kepanitiaan relatif rendah - Keputusan akhir tetap cenderung pada tangan pemberi kekuasaan	5 x 10 = 50	10,52%
6	Kemitraan	- Adanya pembagian tugas yang jelas dalam tiap proses kegiatan - Adanya pelibatan masyarakat dari awal hingga akhir program/kegiatan	6 x 24 = 144	25,26%
7	Pelimpahan Kekuasaan	Kedudukan masyarakat setara dengan pemberi kekuasaan, sehingga bila ada ketidak cocokan maka ada diskusi untuk mencapai sepakat	7 x 30 = 210	31,58%
8	Kontrol Masyarakat	Masyarakat memiliki kekuasaan penuh dalam mengambil keputusan dari awal hingga akhir kegiatan	8 x 15 = 120	15,79%

577

Sumber : data olahan

Berdasarkan Tabel 8 dapat dijelaskan bahwa para responden dominan menunjukkan terdapat delegasi kekuasaan atau kewenangan kepada masyarakat dalam penanganan Kawasan permukiman kumuh. Hal ini dibuktikan dengan frekwensi tertinggi jawaban responden yang mewakili masyarakat kelurahan Sukakarya sebanyak 30 orang atau mencapai 31,58% memilih tangga partisipasi ke-7 dalam level

partisipasi sesuai teori Arnstein. Tingkat partisipasi yang disandingkan dengan tabel perbandingan skala likert, menggambarkan bahwa tingkat partisipasi secara keseluruhan di Kelurahan Sukakarya dengan total nilai 573 berada pada kategori tinggi dengan kondisi bahwa sudah ada pelimpangan wewenang dalam penanganan Kawasan permukiman kumuh kepada masyarakat.

Tabel 8
Kategori Tingkat Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Sukakarya dalam Penanganan Permukiman Kumuh

Kategori	Rentang Nilai	Keterangan
Sangat Rendah	95 – 228	Manipulasi, terapi
Rendah	229 – 361	Pemberian informasi, Konsultasi
Sedang	362 – 494	Perujukan, kemitraan
Tinggi	495 – 627	Pelimpahan Kekuasaan
Sangat tinggi	628 – 760	Kontrol Masyarakat

Sumber : data olahan

Secara menyeluruh RT di Kelurahan Sukakarya (lampiran 5) termasuk dalam kategori kumuh ringan yakni berada antara rentang nilai 16-37. Prioritas Penanganan fisik Kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Sukakarya, diarahkan ke RT. 09 karena berdasarkan penilaian lokasi mencapai angka 33, meskipun demikian terdapat juga 2 RT lain yakni RT 2 dan

7 yang termasuk kategori tertinggi dengan nilai 31. Berdasarkan Tabel 9 dan Tabel 10 diketahui bahwa ada kecenderungan pada Kawasan kumuh dengan nilai kumuh lebih tinggi, maka tingkat partisipasi masyarakat cenderung rendah (Sumarwanto, 2014)

Tabel 9
Prioritas Penangan Fisik Kawasan Kumuh Kelurahan Sukakarya

No	RT	Nilai	Urutan
1	RT001	23	3
2	RT002	31	1
3	RT003	21	4
4	RT004	29	2
5	RT005	27	2
6	RT006	27	2
7	RT007	31	1
8	RT008	23	3
9	RT009	33	1
10	RT010	25	3
11	RT011	23	3
12	RT012	19	4
13	RT013	27	2
14	RT014	23	3
15	RT015	27	2
16	RT016	15	5
17	RT017	17	5
18	RT018	27	2

Sumber : data olahan

Tabel 10
Tingkat Prioritas Partisipasi Masyarakat

RT	Nilai Kumulatif Responden Per RT			Kategori
	Minimal	7,00	Maksimal	
1	3	7,00	24	Sangat Tinggi
2	6	3,17	48	Rendah
3	8	4,25	64	Sedang
4	4	5,25	32	Sedang
5	9	5,67	72	Tinggi
6	9	6,00	72	Tinggi
7	7	6,00	56	Tinggi
8	7	6,86	56	Sangat Tinggi
9	6	2,67	48	Rendah
10	4	7,00	32	Sangat Tinggi
11	5	7,00	40	Sangat Tinggi
12	2	7,00	16	Sangat Tinggi
13	6	7,00	48	Sangat Tinggi
14	7	7,57	56	Sangat Tinggi
15	3	8,00	24	Sangat Tinggi
16	3	8,00	24	Sangat Tinggi
17	3	7,67	24	Sangat Tinggi
18	3	8,00	24	Sangat Tinggi

Sumber : data olahan

SIMPULAN

Rata-rata hasil penilaian kondisi fisik bangunan Gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolalaan persampahan dan kondisi proteksi kebakaran mencapai 14. Sesuai kriteria penilaian Kawasan kumuh, maka Kelurahan Suka karya termasuk dalam kategori Tidak Kumuh . Secara parsial setiap rukun tetangga (RT) memiliki kondisi tingkat kekumuhan sectoral yang berbeda. Hasil penelitian partisipasi yang diwakili oleh 95 responden menunjukkan bahwa

30 orang atau mencapai 31,58% responden memilih tangga partisipasi ke-7 dalam level partisipasi Arnstein. Hal ini menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat di lokasi ini sudah masuk dalam kategori adanya pelimpahan kewenangan kepada masyarakat dalam penanganan Kawasan kumuh.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (BPS), 2022, *Jambi dalam Angka 2021*

- Budihardjo, Eko., 1998, *Sejumlah Masalah Permukiman Kota*, PT.Alumni, Bandung
- Keman, Soedjadi. 2005. Kesehatan Perumahan dan Lingkungan Permukiman. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 2(1).
- Kementerian PUPR RI, 2016, Panduan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan, Jakarta
- Khairudin, H., 1992, *Pembangunan Masyarakat, Tinjauan Aspek Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan*. Liberty, Yogyakarta
- Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883).
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- Sahria Apriliana, 2018, Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) (Studi Tentang: Program Penanganan Drainase dan Sanitasi di Kelurahan Teritip Kota Balikpapan), *e-jurnal Administrasi Negara*, 6(1).
- Sekar Ayu Advianty, 2013, Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Permukiman Kumuh Kelurahan Ploso, *Jurnal Teknik POMITS*, 2(2)
- Sri Handayani, 2008, Partisipasi Masyarakat Kampung Kota Untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman, *Tesis*, IPB, Bogor
- Sugiyono, (2015) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 2015, Alfabeta CV.
- Sumarwanto, 2014, Pengaruh Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dan Permukiman Kumuh Terhadap Tata Ruang Wilayah di Semarang, *Jurnal Ilmiah UNTAG*, Semarang.
- SK Walikota Jambi Nomor: 166 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Jambi,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup